



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 20 Januari 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020
Ketua Rapat	: <b>Arif Wibowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./ Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 30 (tiga puluh) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi C. Kepala Badan Kepegawaian Negara

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan agenda Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020, hari Senin, 20 Januari 2020, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut terkait Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020, sebagai berikut:

1. Kementerian PANRB menyampaikan kebijakan rekrutmen CPNS 2019, sebagai berikut:
  - a. Sebesar 197.111 total formasi CPNS 2019, terdiri dari 37.954 formasi di pusat (dilaksanakan 36.854 formasi) dan 159.257 formasi di daerah (dilaksanakan 159.257 formasi).
  - b. Terdapat dua jenis formasi CPNS 2019, yaitu Umum dan Khusus. Formasi Khusus terdiri dari, cumlaude, diaspora, disabilitas, putra/i papua & papua barat, dan lainnya yang bersifat strategis (*cyber security*).
2. Kementerian PANRB menyampaikan perkembangan rekrutmen dan seleksi CPNS 2019 (per 11 Januari 2020, pukul 08.00 WIB), yaitu sebanyak 4.197.218 pendaftar, sedangkan sebesar 3.364.867 pendaftar yang lolos seleksi administrasi, terdiri dari 1.056.894 pendaftar di pusat dan 2.307.973 pendaftar di daerah.
3. BKN telah berkoordinasi dengan berbagai instansi menetapkan 427 titik lokasi tes SKD yang terdiri atas:
  - a. 34 titik lokasi di BKN (BKN Pusat, Kantor Regional dan UPT)
  - b. 41 titik lokasi *cost sharing* instansi
  - c. 352 titik lokasi mandiri instansi

4. BKN menyampaikan materi tes untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), terdiri dari:

No	Nama Tes	Keterangan	Jumlah Soal
1	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	Untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasionalisme</li> <li>• Integritas</li> <li>• Bela Negara</li> <li>• Pilar Negara</li> <li>• Bahasa Indonesia</li> </ul>	30
2	Tes Intelegensi Umum (TIU)	Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan Verbal</li> <li>• Kemampuan Numerik</li> <li>• Kemampuan Figural</li> </ul>	35
3	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Publik</li> <li>• Jejaring Kerja</li> <li>• Sosial Budaya</li> <li>• Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>• Profesionalisme</li> </ul>	35

### III. KESIMPULAN

1. Terhadap penurunan nilai ambang batas (*passing grade*) pada penerimaan CPNS tahun 2019, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjamin bahwa penurunan *passing grade* pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tidak menyebabkan penurunan kualitas soal, agar penerimaan CPNS tahun 2019 tetap dapat menghasilkan sumberdaya ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme dan profesional sesuai dengan format menuju SMART ASN 2024.

2. Komisi II DPR RI, Kementerian PANRB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian kedepannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.
3. Komisi II DPR RI meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan ketersediaan server, kesiapan sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 di 427 titik lokasi tes SKD.
4. Terhadap lokasi tes SKD yang bekerjasama dengan berbagai instansi, Komisi II DPR RI meminta BKN meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan server berada di tempat yang aman, kesiapan jaringan internet dan ketersediaan daya listrik, terutama di daerah Jabodetabek yang belum lama ini terkena bencana banjir.
5. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan birokrasi dengan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya dengan tidak mengurangi penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.

**Jakarta, 20 Januari 2020**

**KETUA RAPAT**



**ARIF WIBOWO**  
**A-210**